



# **Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang 2013**



Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
dengan Badan Pusat Statistik Kota Sabang





# **Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang 2013**



Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
dengan Badan Pusat Statistik Kota Sabang

# **ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SABANG TAHUN 2013**

No. Katalog BPS : 4102002.1172

Ukuran Buku : 14,81 x 21 cm

Jumlah Halaman : xi + 79 Halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kota  
Sabang

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kota  
Sabang

Dicetak Oleh : Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
(BAPPEDA) Kota Sabang

*Boleh Dikutip Dengan Menyebutkan Sumbernya*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SABANG**

*Jln. T. Umar No.28 Sabang Telp (0652) 21346*

---

**KATA PENGANTAR**

Syukur kehadiran Allah SWT penyusunan buku Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang Tahun 2013 dapat diterbitkan. Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Sabang dan diharapkan dapat menghasilkan bahan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sabang.

Disadari, bahwa Pembangunan Manusia mempunyai dimensi yang sangat luas, interpretasi pencapaian pembangunan manusia yang luas tersebut dikaji dari tiga aspek terpenting, yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat hidup layak.

Meskipun telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan, namun sepenuhnya belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai data secara menyeluruh. oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang

## Pengantar

konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Penerbitan publikasi ini terlaksana atas kerja sama Badan Pusat Statistik Kota Sabang dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Sabang yang telah memberikan biaya dan kepada semua pihak yang telah memberi bantuan hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sabang, Oktober 2013  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Sabang

H. YUSRI YUSUF, S.Si  
NIP. 19581018 198103 1 002



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)  
JALAN YOS SUDARSO NO 45**

**Fax: 0652 – 21184    SABANG    Telp: (0652) 22922**

---

---

### **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warganya, Sabang perlu mempercepat laju pembangunan daerah. Guna mendukung tercapainya tujuan ini, data yang akurat sangat diperlukan sehingga perencanaan pembangunan dapat dirumuskan tepat waktu, efektif serta berkesinambungan guna mendukung pencapaian hasil yang optimal.

Penerbitan publikasi "Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang Tahun 2013" ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan data akurat tentang pembangunan manusia di Kota Sabang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan alat advokasi bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan

## Pengantar

yang perlu dilakukan dimasa mendatang, karena IPM merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang akan menjadi bahan masukan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Kegiatan penyusunan Publikasi ini merupakan kerjasama antara Bapeda Kota Sabang dengan Badan Pusat Statistik Kota Sabang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Sabang, Oktober 2013  
Plt. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Kota Sabang

Faisal Azwar, ST, MT  
NIP. 19700803 199903 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		iii
DAFTAR ISI.....		vii
DAFTAR TABEL.....		ix
DAFTAR GAMBAR.....		xi
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Kerangka Berfikir.....	3
	1.2 Permasalahan.....	14
	1.3 Tujuan.....	15
BABII	METODOLOGI	
	2.1 Sumber Data.....	19
	2.2 Indikator.....	22
	2.3 Penghitungan IPM.....	25
	2.3.1 Komponen dan Indikator IPM.....	25
	2.3.2 Formula Penghitungan IPM.....	33
	2.3.3 Ukuran Perkembangan IPM.....	35
BAB III	GAMBARAN UMUM KOTA SABANG	
	3.1 Kondisi Geografis.....	39
	3.2 Kependudukan.....	40
	3.3 Dinamika Penduduk.....	42
BAB IV	IPM KOTA SABANG DAN KOMPONENNYA	
	4.1 Harapan Hidup.....	50
	4.2 Tingkat Pendidikan.....	59
	4.3 Kemampuan Daya Beli.....	67
	4.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	69
	4.5 Reduksi <i>Shortfall</i> .....	71

## Pengantar

BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	75
	5.2 Saran.....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skor Komponen Kualitas Rumah.....	29
Tabel 2.2	Daftar Komoditi terpilih untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP).....	31
Tabel 2.3	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....	34
Tabel 4.1	Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Sabang Tahun 2007-2012.....	51
Tabel 4.2	Jumlah Sekolah, Murid, Guru Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Sabang Tahun 2012.....	61
Tabel 4.3	Pengeluaran Perkapita Riil di Kota Sabang Tahun 2008-2012.....	68
Tabel 4.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sabang Tahun 2008-2012.....	70

# Pengantar

<http://sabangkota.bps.go.id>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Perkembangan Penduduk Kota Sabang Tahun 2007-2012.....	43
Gambar 2	Persentase Penduduk Kota Sabang Menurut Kelompok Umur Tahun 2012.....	44
Gambar 3	Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Sabang Tahun 2012.....	54
Gambar 4	Persentase Balita yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Menyusui di Kota sabang Tahun 2012.....	58
Gambar 5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) di Kota Sabang Tahun 2007-2012.....	63
Gambar 6	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Sabang Tahun 2007-2012.....	64
Gambar 7	Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Sabang Tahun 2012.....	66



# Pendahuluan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Kerangka Berfikir**

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi atau yang lebih populer dengan nama otonomi daerah, telah memotivasi daerah-daerah tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/ kota untuk lebih mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan SDM yang handal. Dengan otonomi daerah, perencanaan pembangunan tidak lagi dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu membuat perencanaan yang dekat dengan realitas kebutuhan masyarakat. Tidak terkecuali Kota Sabang yang merupakan wilayah paling barat dari negara Republik Indonesia.

Perencanaan yang dilakukan tidak lagi mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi ataupun pemenuhan sarana dan prasarana bagi peningkatan kesejahteraan penduduknya, tetapi juga memperhitungkan potensi terbesar dari penduduk sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Karena itu muncul paradigma pembangunan dimana manusia (penduduk) ditempatkan sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Paradigma ini disebut pembangunan manusia.

## Pendahuluan

Menurut laporan *United Nation Development Programme (UNDP)* pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*). Dari berbagai pilihan yang ingin dicapai, salah satu pilihan terpenting adalah agar manusia dapat berumur panjang dan sehat, memiliki ilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar manusia dapat hidup dengan layak. Pilihan lain yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi manusia dan harga diri. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan, tetapi mementingkan pula apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk menikmati kehidupan, melakukan kegiatan produktif, atau ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, dan sosial politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan keseluruhan aspek tersebut.

Kualitas manusia atau sumber daya manusia menjadi begitu penting dalam pembangunan Kota Sabang. Oleh

## Pendahuluan

karena itu pembangunan tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi melainkan juga mengarah pada peningkatan kualitas manusianya. Dengan diterapkannya sumber daya manusia sebagai salah satu kebijakan strategis, maka tekad pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih banyak pada pembangunan manusia perlu mendapat dukungan.

Pembangunan manusia mensyaratkan adanya kebebasan. Tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan menjalani kehidupan. Manusia harus bebas untuk dapat melakukan apa yang menjadi pilihannya di dalam sistem pasar yang berfungsi dengan baik, dan mereka harus memiliki suara yang menentukan dalam membentuk kerangka politik mereka. Orang yang memiliki kebebasan politik dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kerangka aturan-aturan yang demokratis menuju konsensus dan konsolidasi.

## Pendahuluan

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pembangunan manusia mempunyai empat elemen, yaitu: produktivitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktivitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi sekarang maupun generasi penerus. Semua orang, perempuan ataupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan

keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan utamanya meliputi tiga aspek penting, yaitu peningkatan *kualitas fisik* (kesehatan), *intelektualitas* (pendidikan), maupun *kemampuan ekonominya* (daya beli) seluruh komponen masyarakat. Hal yang tidak kalah penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM adalah pembinaan aspek moral (keimanan dan ketaqwaan), sehingga pemanfaatan kemampuan fisik, kecerdasan dan daya beli merupakan perwujudan dari rasa keimanan dan ketaqwaan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui proses pembangunan pada dasarnya telah mulai digulirkan semenjak era Orde Baru, yaitu pada saat pelaksanaan PELITA IV yang lalu. Pada masa tersebut, fokus utama pembangunan tidak semata untuk mengejar tingkat pertumbuhan, tetapi juga pada aspek peningkatan kualitas penduduk. Perubahan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan yang lebih mementingkan pada aspek pertumbuhan (ekonomi tinggi) ternyata tidak menjamin

## Pendahuluan

terjadinya percepatan dari proses pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa diimbangi dengan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan malah menjadi lahan subur bagi berkembangnya kerawanan sosial.

Pentingnya aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan telah menjadi perhatian Sayogyo (1991) yang menekankan bahwa pemerataan hasil-hasil pembangunan akan mendukung bagi terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja yang lebih luas bagi masyarakat. Paradigma mengenai pembangunan di dunia terus mengalami pergeseran orientasi.

Pada dasawarsa 1960-an pembangunan diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi atau lebih menekankan pada peningkatan produksi, sedangkan pada dekade 1970-an orientasi pembangunan pada penekanan distribusi hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya pada dasawarsa 1980-an muncul konsep pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pada tahun 1990-an muncul konsep pembangunan yang terpusat kepada manusia. Pergeseran orientasi pembangunan tersebut disebabkan kenyataan bahwa walaupun tujuan

## Pendahuluan

pembangunan telah dicapai namun masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan perbedaan yang tinggi antara kaya dan miskin masih terjadi.

Pembangunan manusia seutuhnya senantiasa menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan acuan pembangunan yang sebenarnya. Dalam kerangka ini maka pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas SDM sebagai sumber daya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan meningkat dengan sendirinya.

Seluruh program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan, difokuskan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi : " ... *suatu Pemerintah Negara Indonesia yang*

## Pendahuluan

*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".* Sehubungan dengan itu, maka peningkatan sumber daya manusia, baik secara fisik maupun non fisik menjadi pilihan mutlak yang harus dilakukan.

Berbagai program pembangunan, seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olahraga, dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Tetapi, tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan agak sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik saja, sedangkan kualitas non fisik tidak bisa tercakup karena indikatornya relatif lebih abstrak.

Indikator kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan dan tampaknya lebih populer digunakan dewasa ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merefleksikan salah satu aspek strategis dalam pencapaian pembangunan yaitu pemerataan hasil-hasil pembangunan yang selaras dengan konsep delapan jalur pemerataan.

## Pendahuluan

Seperti telah diketahui secara seksama bahwa tujuan utama program 8 jalur pemerataan adalah meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja.

Sebagai negara yang sedang berkembang, kesempatan kerja merupakan masalah utama bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Alur mekanisme yang diharapkan terjadi dalam implementasi dari pelaksanaan delapan jalur pemerataan adalah sebagai berikut: dalam konteks pembangunan manusia, kebijakan yang ditujukan untuk memperluas kesempatan berusaha (*jalur pertama*) dan kesempatan kerja (*jalur kedua*) adalah kebijakan yang memihak pada kelompok penduduk yang tertinggal, dan merupakan kunci karena akan menciptakan pendapatan (*jalur ketiga*) dan membuat penduduk mempunyai daya beli. Demikian juga dengan kedua jalur berikutnya yang merupakan penjabaran dari kebutuhan dasar (*jalur keempat*) serta akses pada pendidikan dan kesehatan (*jalur kelima*) merupakan mata rantai yang berkaitan dan ditentukan oleh jalur ketiga. Lima jalur pertama ini merupakan mata rantai yang membentuk kondisi kehidupan.

## Pendahuluan

Hubungan antara tiga jalur lainnya, yaitu pemerataan partisipasi (*jalur keenam*), pemerataan antar daerah (*jalur ketujuh*), dan sumber daya hukum (*jalur kedelapan*), dengan lima jalur pertama adalah bahwa masing-masing menelusuri kaitan “mata rantai kondisi kehidupan” dari lima jalur pertama yang menentukan daya jangkau ke sejumlah kebutuhan dasar manusia dan kemudian menentukan kualitas kehidupan. Sampai sejauh mana pemerataan partisipasi (*jalur keenam*), sampai sejauh mana tercapainya pemerataan nafkah antar daerah, desa, kota (*jalur ketujuh*), serta sampai sejauh mana kepastian hukum (*jalur kedelapan*) menjamin berlangsungnya pemerataan `nafkah yang akan menentukan sampai sejauh mana upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, dan hasilnya akan dapat digambarkan melalui indikator komposit IPM.

Peningkatan kesempatan berusaha dan bekerja ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Walaupun tampaknya hal ini hanya akan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk lebih dahulu berkembang karena mempunyai akses ekonomi, namun dalam jangka panjang akan dapat

## Pendahuluan

menciptakan kesempatan kerja yang cukup besar. Pembangunan bidang ekonomi mendapat perhatian yang besar pada awal Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I), karena tanpa pembangunan ekonomi, lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi, hampir tidak mungkin dapat mengentaskan kemiskinan karena peluang penciptaan kesempatan kerja, berusaha, dan pendapatan serta peluang-peluang yang memungkinkan perekonomian berkembang menjadi kecil.

Pembangunan bidang sosial yang telah dilaksanakan merupakan contoh bagaimana upaya pemberdayaan golongan penduduk yang kurang mampu secara ekonomi dilakukan melalui program pemberantasan buta huruf, program wajib belajar 9 tahun, pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu, imunisasi, perbaikan gizi keluarga. Secara nyata melalui program tersebut, akses penduduk untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan telah meningkat. Program pembangunan tersebut tidak lain ditujukan untuk lebih pemeratakan hasil pembangunan bagi semua lapisan masyarakat.

## Pendahuluan

Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembangunan di Kota Sabang selama tahun 2011 khususnya di bidang Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Sabang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Sabang menyusun publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang Tahun 2013..

### 1.2. Permasalahan

Berbagai kebijakan pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sabang, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kebijakan tersebut diperlukan penjelasan terhadap hal-hal berikut:

1. Alat ukur apa yang perlu digunakan untuk mengukur hasil pembangunan sumber daya manusia tersebut?
2. Sudah sampai tahap mana penduduk Kota Sabang mampu meningkatkan kualitas fisik penduduknya?

3. Faktor-faktor apa saja yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas fisik penduduk di Kota Sabang?

### 1.3. Tujuan

Semua program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk harus selalu dipantau dan dievaluasi. IPM merupakan suatu kajian analisis terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat di suatu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Ketiga indeks yang merupakan komponen dari indeks pembangunan manusia diharapkan mampu mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang Tahun 2013 adalah:

- a. Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kota Sabang.
- b. Memaparkan perkembangan pembangunan manusia di Kota Sabang dan melihat sejauh mana dampak pembangunan selama ini terhadap peningkatan kualitas penduduk di Kota Sabang.

## Pendahuluan

- c. Sebagai input dan output terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan pada masa mendatang di Kota Sabang.
- d. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti, cendekiawan, pelaku ekonomi dan konsumen data dalam penelitian maupun sebagai sumber pustaka.

# Metodologi



## BAB II METODOLOGI

---

### 2.1. Sumber Data

Pemikiran tentang pembangunan (paradigma) telah mengalami pergeseran dewasa ini, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan

## Metodologi

keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi, agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran, pada pelaksanaannya semua proses tersebut harus didukung oleh ketersediaan data statistik yang baik. Di Indonesia lembaga penyedia data bagi kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPS menyelenggarakan berbagai sensus dan survei, baik yang menyangkut kependudukan dan kesejahteraannya maupun masalah ekonomi. Cukup banyak kegiatan pengumpulan data (sensus/survei) yang berkaitan dengan kependudukan dan kesejahteraannya. Survei-survei besar yang dilakukan BPS antara lain: Sensus Penduduk (SP) yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan tiap tahun yang berakhir angka 5, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan setiap tahun, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan semesteran, dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Dari hasil sensus/survei tersebut terutama Susenas, dapat diturunkan berbagai indikator kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dapat berguna untuk melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Di samping ini hasil sensus/survei tersebut perlu dianalisis atau diinterpretasikan agar mudah digunakan oleh para perencana atau pengambil keputusan pembangunan.

Data utama yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia Kota Sabang bersumber dari hasil SUSENAS tahun 2012. Susenas merupakan survei rumah tangga yang menyediakan data sosial ekonomi rumah tangga dari waktu ke waktu. Data yang dikumpulkan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu data KOR (pokok) dan data modul (sasaran).

Data KOR dikumpulkan setiap tahun dengan ukuran sampel secara nasional lebih dari 200.000 rumah tangga, yang menunjukkan estimasi beberapa *variabel* sosial ekonomi yang representative sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Susenas KOR 2011 digunakan untuk menghitung indikator Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah.

## Metodologi

Data modul mempunyai topik yang berbeda per 3 tahun sekali. Data modul yang digunakan dalam publikasi ini adalah modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga tahun 2012. Data ini digunakan untuk menghitung pengeluaran riil per kapita yang didasarkan pada 27 komoditi terpilih. Untuk memperoleh pengeluaran riil per kapita tahun 2012, harga dari 27 komoditi tersebut disesuaikan terlebih dahulu dengan perkembangan inflasi selama periode 2010-2012.

Sedangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan data pembandingan, digunakan data dari hasil survei/sensus yang lain, diantaranya Sesus Penduduk tahun 2010, proyeksi penduduk Kota Sabang tahun 2012, penghitungan PDRB Kota Sabang tahun 2009-2012, Sabang Dalam Angka tahun 2013.

### **2.2. Indikator**

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan

yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) sah (*valid*), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu angka melek huruf (AMH), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun ( $e_1$ ).

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

## Metodologi

- (a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.
- (b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.
- (c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain.

### 2.3. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup ( $e_0$ ), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

#### 2.3.1. Komponen dan Indikator IPM

Komponen IPM adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau  $e_0$  yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Tahun rujukan  $e_0$  yang digunakan dalam laporan ini adalah 1990, 1995 dan 1996, yang diperoleh berdasarkan suatu model proyeksi. Rujukan tahun ini berbeda dengan rujukan tahun yang digunakan dalam penghitungan IPM yang dipublikasikan BPS sebelumnya (1996) yang berjudul "Indeks Pembangunan Manusia: Perbandingan Antar Propinsi 1990-1993".

## Metodologi

Model proyeksi menggunakan data historis sejak akhir dekade 1960-an dan mengasumsikan, antara lain, bahwa Angka Kematian Bayi akan mencapai 20 per 1000 kelahiran pada tahun 2018.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas Kor. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDRB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GRDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak

tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- ◆ Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A).
- ◆ Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota provinsi yang sesuai (=B).
- ◆ Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 2.1).

- ◆ Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
- ◆ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

## Metodologi

$$PPP / unit = \frac{\sum_j^i E_{(i,j)}}{\sum_j^i (P_{(i,j)} \cdot q_{(i,j)})}$$

Untuk:

- $E_{(i,j)}$  : Pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke-i
- $P_{(i,j)}$  : Harga komoditi j di propinsi ke-i
- $q_{(i,j)}$  : Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di propinsi ke-i

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut :

Tabel 2.1 Skor Komponen Kualitas Rumah

Komponen	Kualitas		Skor	
	A	B	A	B
Lantai	Keramik marmer atau granit	Lainnya	1	0
Luas lantai per kapita	$\geq 10 \text{ m}^2$	Lainnya	1	0
Dinding	Tembok	Lainnya	1	0
Atap	Kayu/sirap, beton	Lainnya	1	0
Fasilitas penerangan	Listrik	Lainnya	1	0
Fasilitas air minum	Leding	Lainnya	1	0
Jamban	Milik sendiri	Lainnya	1	0

Catatan : Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah  $6/8$  atau 0,75 unit.

## Metodologi

Sedangkan komoditi yang digunakan untuk menghitung paritas daya beli masyarakat dihitung berdasarkan beberapa komoditi yang biasa di konsumsi masyarakat berdasarkan data SUSENAS, disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel 2.2 Daftar Komoditi Terpilih untuk penghitungan PPP*

<b>Komoditi</b>	<b>Unit</b>	<b>Sumbangan Terhadap Total Konsumsi (%)<sup>*</sup></b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Beras lokal	Kg	7.25
2. Tepung terigu	Kg	0.10
3. Ketela pohon	Kg	0.22
4. Ikan	Kg	0.50
5. Ikan teri	Ons	0.32
6. Daging sapi	Kg	0.78
7. Daging ayam kampung	Kg	0.65
8. Telur ayam	Butir	1.48
9. Susu kental manis	397 gram	0.48
10. Bayam	Kg	0.30
11. Kacang panjang	Kg	0.32
12. Kacang tanah	Kg	0.22
13. Tempe	Kg	0.79
14. Jeruk	Kg	0.39
15. Pepaya	Kg	0.18
16. Kelapa	Butir	0.56
17. Gula pasir	Ons	1.61
18. Kopi bubuk	Ons	0.60
19. Garam	Ons	0.15
20. Merica/lada	Ons	0.13
21. Mie instant	80 gram	0.79

22.	Rokok kretek/filter	10 batang	2.86
23.	Listrik	Kwh	2.06
24.	Air minum	M <sup>3</sup>	0.46
25.	Bensin	Liter	1.02
26.	Minyak tanah	Liter	1.74
27.	Sewa rumah	Unit	11.56
T o t a l			37.52

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{jika } C_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$C_{(i)}$  = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

$Z$  = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai  $Z$  ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

## Metodologi

### 2.3.2. Formula Penghitungan IPM

Formula penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{IPM} = 1/3 [\mathbf{X}_{(1)} + \mathbf{X}_{(2)} + \mathbf{X}_{(3)}] \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

$\mathbf{X}_{(1)}$  : Indeks harapan hidup

$\mathbf{X}_{(2)}$  : Indeks pendidikan =  $2/3$ (indeks melek huruf) +  $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$\mathbf{X}_{(3)}$  : Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut;

$$\text{Indeks } \mathbf{X}_{(i)} = \mathbf{X}_{(i)} - \mathbf{X}_{(i)\min} / [\mathbf{X}_{(i)\maks} - \mathbf{X}_{(i)\min}] \dots \dots \dots (2)$$

dimana :

$\mathbf{X}_{(1)}$  : Indikator ke-i ( $i = 1, 2, 3$ )

$\mathbf{X}_{(2)}$  : Nilai maksimum  $\mathbf{X}_{(i)}$

$\mathbf{X}_{(3)}$  : Nilai minimum  $\mathbf{X}_{(i)}$

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator  $\mathbf{X}_{(i)}$  disajikan pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 2004	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

- Catatan: a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1993-2018.
- b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1990 di daerah pedesaan Sulawesi Selatan dan tahun 2004 di Papua.

## Metodologi

Konsumsi per kapita yang disesuaikan untuk tahun 2004 sama dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan tahun 1996.

### 2.3.3. Ukuran Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi *Shortfall* per tahun (*annual reduction in shortfall*). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang *telah* ditempuh dengan capaian yang masih *harus* ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM ( $=r$ ) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \left[ \frac{(\text{IPM}_{t+n} - \text{IPM}_t) \times 100}{(\text{IPM}_{\text{ideal}} - \text{IPM}_t)} \right]^{1/n} \dots (3)$$

Keterangan:

- IPM<sub>t</sub> : IPM pada tahun t
- IPM<sub>t+n</sub> : IPM pada tahun t + n
- IPM<sub>ideal</sub> : 100

Sebagai catatan, rumus tersebut menghasilkan angka dalam persentase. Selain itu, rumus tersebut dapat pula digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan komponen IPM.

<http://sabangkota.bps.go.id>



# Gambaran Umum





## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KOTA SABANG**

---

#### **3.1. Kondisi Geografis**

Sebagai wilayah dengan sebutan *Nol Kilometer Indonesia*, Kota Sabang memiliki karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu pulau *web*, pulau *Rondo*, pulau *Seulako*, pulau *Rubiah* dan pulau *Klab*. Pulau *web* merupakan pulau yang paling besar dan paling banyak dihuni penduduk. Selain pulau *web*, pulau yang berpenduduk di kawasan kota Sabang adalah pulau *Rubiah*.

Secara geografis Kota Sabang terletak pada posisi 05°46'28"-05°54'28" Lintang Utara dan 95°13'02"-95°22'36" Bujur Timur dengan luas daerah 122 km<sup>2</sup>. Kota Sabang berbatasan dengan selat malaka disebelah utara dan timur, dan Laut Andaman disebelah selatan dan barat. Karena letaknya yang sangat strategis maka kawasan ini disebut kawasan perdagangan bebas.

Kota Sabang terbagi menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Sukajaya dan kecamatan Sukakarya dengan luas

## Gambaran Umum

daerah masing-masing sebesar 61 km<sup>2</sup> dan 61 km<sup>2</sup>. Kecamatan Sukajaya terdiri dari sepuluh kelurahan dan terbagi dalam 39 Jurong. Sedangkan kecamatan Sukakarya mempunyai luas sebesar 61 km<sup>2</sup> yang memiliki delapan kelurahan dan terbagi dalam 35 Jurong.

### 3.2 Kependudukan

Permasalahan pembangunan yang cukup *urgen* dan seringkali menjadi beban dalam proses pembangunan dewasa ini adalah jumlah infrastruktur yang belum memadai dan besarnya jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Kota Sabang sebesar 31.782 jiwa. Jumlah tersebut mendiami wilayah seluas 122 km<sup>2</sup> sehingga secara rata-rata kepadatan penduduk di Kota Sabang adalah 260 jiwa per km<sup>2</sup>. Disamping itu hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2012 sebanyak 6.500 penduduk Sabang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, Pemerintah dituntut melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk miskin yang besar karena pada gilirannya akan membebani proses pembangunan ke depan jika kualitas

## Gambaran Umum

penduduknya masih relatif rendah.

Arah dan kebijakan pemerintah tentang kependudukan diwujudkan melalui pengendalian kualitas penduduk pengembangan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah bersama-sama masyarakat. Pengendalian kualitas penduduk diarahkan pada terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.

Untuk menurunkan angka kematian, diselenggarakan upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, serta memperpanjang usia harapan hidup rata-rata melalui kebijaksanaan upaya peningkatan kualitas hidup dan lingkungan.

Penduduk merupakan aset yang dapat menguntungkan bila diarahkan dengan baik tetapi juga sangat menjadi beban bila salah dalam mengarahkannya. Oleh karena itu perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia harus tepat dan benar-benar mencapai sasaran.

## Gambaran Umum

### 3.3 Dinamika Penduduk

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat penting, karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak begitu besar dan berkualitas rendah sangat menghambat pembangunan daerah. Sehingga, untuk menunjang keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan perkembangan kependudukan haruslah diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk Kota Sabang selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2005 karena adanya bencana *gempa dan tsunami* yang melanda provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya. Tren jumlah penduduk Kota Sabang periode 2006-2012 dapat dilihat pada gambar 1. Penduduk Kota Sabang meningkat dari 29.098 jiwa pada tahun 2006 menjadi 31.782 jiwa pada tahun 2012, atau tumbuh sebesar 9,22 persen dari tahun 2006.

*Gambar 1. Perkembangan Penduduk Kota Sabang Tahun 2007-2012*

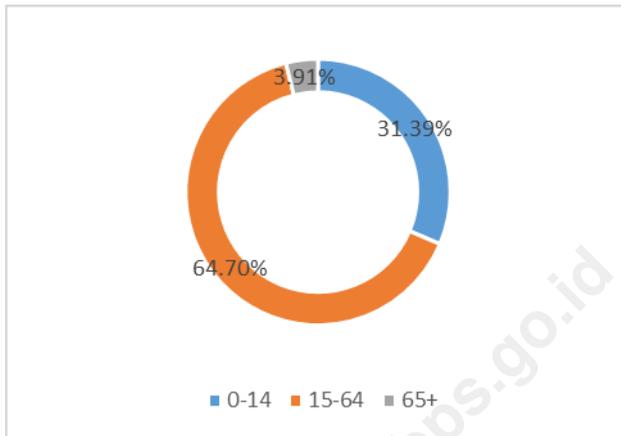


*Sumber: Sabang Dalam Angka 2012*

Mempelajari struktur umur penduduk suatu wilayah cukup penting, terutama yang berkaitan dengan jumlah penduduk usia produktif karena merekalah kelompok penunjang bagi kelompok usia muda dan usia tua. Persentase penduduk Kota Sabang menurut kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

## Gambaran Umum

*Gambar 2. Persentase Penduduk Sabang Menurut Kelompok Umur Tahun 2012*



*Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas 2012)*

Dari Gambar 2 dapat diketahui sebagian besar penduduk Kota Sabang adalah penduduk usia produktif, karena 64,70 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Sabang berusia 15-64 tahun. Sedangkan persentase penduduk muda lebih besar dari penduduk tua. Penduduk dengan usia 0-14 tahun di Kota Sabang sebesar 31,39 persen dan penduduk usia 65 tahun keatas sebesar 3,91 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Sabang. Dengan demikian, penduduk Kota Sabang dapat dikategorikan pada penduduk usia muda.

## Gambaran Umum

Kenyataan ini bisa jadi membawa keuntungan bagi pembangunan Kota Sabang maupun masalah. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan komposisi penduduk muda adalah bahwa tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Sabang relatif rendah sehingga pemerataan pembangunan dapat dioptimalkan. Sedangkan masalah dapat terjadi apabila lapangan pekerjaan tidak mencukupi di Kota Sabang sehingga akan menimbulkan banyaknya pengangguran penduduk usia produktif.



# IPM & Komponennya





## **BAB IV**

### **IPM KOTA SABANG DAN KOMPONENNYA**

---

Pembangunan manusia sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi, karena manusia adalah pelaku ekonomi maka bila pembangunan manusia berhasil maka manusia itu sendiri yang akan meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Di Kota Sabang pembangunan manusia telah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah, hal ini dilihat dari pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pembangunan di bidang pendidikan dilakukan dengan memberikan pendidikan gratis dari jenjang Sekolah dasar sampai sekolah menengah (SMU/ sederajat) kepada masyarakat, selain itu juga upaya perbaikan fasilitas pendidikan serta jumlah sarana pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan dengan perbaikan fasilitas kesehatan serta penyuluhan melalui posyandu dan puskesmas pembantu. Di bidang ekonomi pemerintah daerah memperkuat sektor ekonomi dengan melakukan pemanfaatan lahan, seperti penanaman lahan kosong dengan jagung, singkong dan lain sebagainya.

## Analisis Statistik

### 4.1 Harapan Hidup

Dalam penghitungan IPM, indikator kesehatan diukur dengan angka harapan hidup (AHH). Menurut data Susenas 2006-2010 pada tabel 4.1, pencapaian angka harapan hidup penduduk Kota Sabang pada tahun 2008 sebesar 70,36 tahun. Angka ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2009 mencapai 70,69 tahun, tahun 2010 meningkat menjadi 71,02 tahun, tahun 2011 mencapai 71,30 tahun dan pada tahun 2012 mencapai 71,59 tahun. Artinya secara rata-rata, penduduk Kota Sabang akan bertahan hidup hingga usia 71 tahun. Perkembangan angka harapan hidup ini tergolong lambat, hal ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kota Sabang masih belum cukup baik.

*Rata-rata Penduduk Kota Sabang akan Bertahan Hidup Hingga Usia 71 tahun*

Sedangkan indeks harapan hidup penduduk Kota Sabang pada tahun 2010 adalah 77,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk Kota Sabang untuk hidup lebih lama dan hidup sehat termasuk kategori

sedang, dimana standar harapan hidup paling tinggi adalah 85 tahun. Tampaknya diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektor, agar perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya angka harapan hidup dan terus menurunnya angka kematian bayi secara baik dapat terwujud di masa depan.

*Tabel 4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Sabang Tahun 2008-2012*

<b>Tahun</b>	<b>Angka Harapan Hidup (Tahun)</b>
(1)	(2)
2008	70,36
2009	70,69
2010	71,02
2011	71,30
2012	71,59

*Sumber : BPS Kota Sabang, 2012.*

Selain keterkaitannya dengan penghitungan IPM, angka harapan hidup (AHH) ini sendiri memiliki keterkaitan dengan variabel kesehatan lainnya, seperti angka kesakitan (*morbiditas*), angka kematian (*mortalitas*), pelayanan dasar

## Analisis Statistik

kesehatan, sanitasi perumahan dan lingkungan serta variabel lainnya. Oleh karenanya, analisis terhadap variabel-variabel kesehatan ini dapat menjadi bahan penunjang dalam menggambarkan kondisi pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Kondisi kesehatan masyarakat, yang juga digunakan untuk memantau hasil pembangunan manusia, merupakan hasil interaksi dari banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor lingkungan, keadaan sosial-budaya (misalnya, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang berpegang teguh pada tradisi yang menghambat modernisasi), kondisi ekonomi dan faktor genetik.

Faktor lingkungan, antara lain dapat dilihat dari kualitas dan fasilitas fisik perumahan termasuk didalamnya sanitasi perumahan dan lingkungan. Ketersediaan air bersih, tempat pembuangan tinja dan kondisi fisik perumahan seperti jenis lantai, atap dan dinding, memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Banyak ditemui di daerah-daerah dengan kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak memadai, penyakit diare serta ISPA menyerang penduduk, khususnya anak-anak. Tentu saja hal ini akan

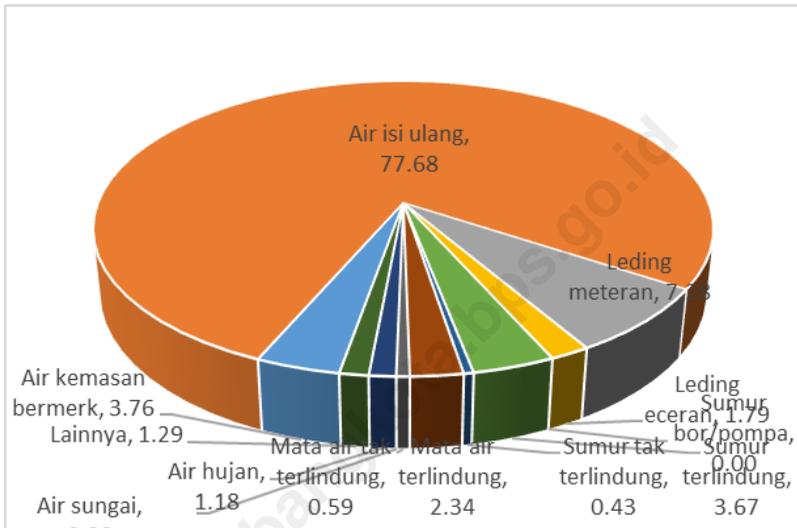
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, sehingga harapan untuk membentuk SDM yang tangguh dan handal di masa mendatang akan mengalami hambatan.

Perbedaan status daerah perkotaan dan pedesaan tampaknya turut mempengaruhi kondisi umum sanitasi perumahan dan lingkungan setempat. Kebutuhan akan usaha sanitasi di perkotaan akan berbeda dibanding pedesaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kepadatan penduduk dan karakteristik kehidupan penduduknya. Wilayah perkotaan, kepadatan penduduk relatif tinggi sehingga pada umumnya perumahan penduduk tidak memiliki halaman yang luas seperti di pedesaan. Area kumuh perkotaan, penyediaan air minum, pembuangan kotoran dan sampah tidak lagi bersifat tersendiri untuk tiap keluarga, melainkan diadakan untuk umum. Pedesaan, masih ditemui cukup banyak penduduk yang buang air besar ke hutan ataupun tempat-tempat terbuka lainnya (misalnya: kebun, kolam, laut dan sebagainya). Ironisnya, masih banyak penduduk yang menggunakan air sumur tidak terlindung dan air hujan untuk keperluan air minumnya. Begitu pula dengan tempat pembuangan sampah, umumnya penduduk pedesaan

## Analisis Statistik

membuang sampah begitu saja di pekarangan, hal ini tentu akan mempermudah penularan kuman penyakit.

*Gambar 3. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Sabang Tahun 2012*



*Sumber : Susenas 2012, BPS.*

Dalam hal sumber air minum, berdasarkan hasil data Susenas 2012, masyarakat Kota Sabang mengalami kemajuan karena sebagian besar penduduknya (yaitu 77,68 persen) menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum. Selebihnya sebesar 7,28 persen rumah tangga di kota Sabang diantaranya menggunakan air leding meteran, air kemasan

bermerk (3,76 persen), air hujan (1,18 persen) dan sumur terlindung 3,67 persen. Tidak berbeda dari tahun sebelumnya (Hasil Susenas 2011) yaitu masyarakat Sabang sebagian besar mengkonsumsi air yang bersumber dari air isi ulang.

Keadaan ini dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi masih ada masyarakat Sabang yang mengkonsumsi air kurang sehat yang bersumber dari mata air tak terlindung, sumur tak terlindung dan air hujan. Hal ini harus di perhatikan karena akan dikhawatirkan timbulnya dampak besar pada kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi aktivitas dan produktivitas masyarakat itu sendiri.

Keadaan ekonomi dan tingkat penghasilan yang masih rendah merupakan hambatan utama terhadap berhasilnya usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan. Namun hal ini bukan berarti mereka yang berpenghasilan relatif tinggi akan terlepas dari masalah ini. Pendidikan yang relatif rendah mengakibatkan perilaku hidup sehat masih belum tertanam dalam kehidupan masyarakat. Begitu pun tradisi atau kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya

## Analisis Statistik

membuang hajat di sembarang tempat, agaknya cukup sulit untuk diubah.

Kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak sehat secara umum akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Implikasinya angka morbiditas akan meningkat. Angka morbiditas yang tinggi memiliki kontribusi yang besar terhadap angka kematian. Indikator kematian yang dapat dipantau secara berkesinambungan adalah angka kematian bayi (AKB).

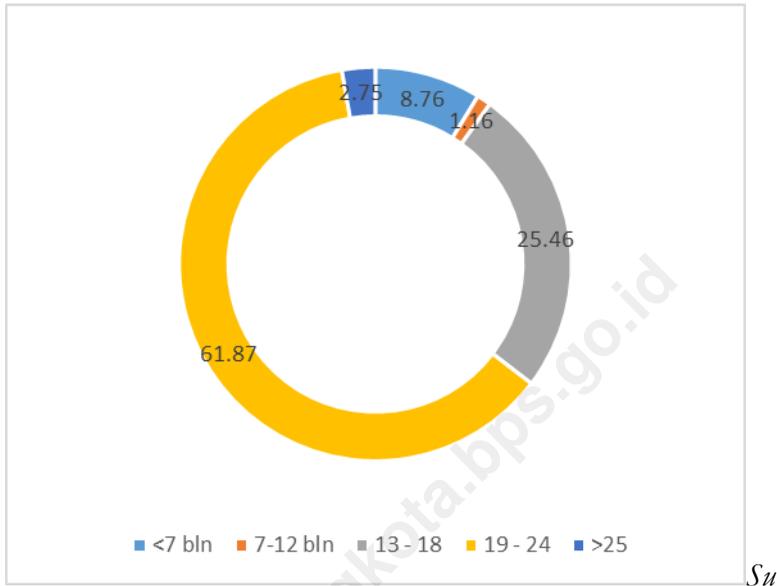
Hal lain yang berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pemberian air susu ibu (ASI) terhadap bayi berumur dibawah 5 tahun (balita). Kepedulian terhadap ASI merupakan masalah global yang ditandai dengan komitmen UNICEF untuk meningkatkan penggunaan ASI. ASI berperan besar bagi tumbuh kembang serta kelangsungan hidup seorang anak. Apalagi ASI bermanfaat dalam hal kesehatan dan pengikat kasih sayang antara ibu dan anak.

Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh untuk menangkal berbagai macam penyakit. Sistem kekebalan tubuh dapat diperoleh secara alami maupun buatan. Biasanya

jika seseorang sudah terkena suatu jenis penyakit, ia akan kebal terhadap penyakit tersebut, karena tubuh membuat zat anti bodi dari penyakit yang diderita. Kekebalan tubuh juga dapat diperoleh dari hasil suntikan/imunisasi dasar yang umumnya diberikan hingga anak berumur kurang dari satu tahun. ASI merupakan alat vaksinasi alami untuk membangun kekebalan tubuh seorang anak terhadap penyakit. Dalam ASI terkandung zat imunisasi yang menyebabkan seorang bayi kebal terhadap penyakit. Lamanya pemberian ASI terhadap seorang anak akan sangat mempengaruhi keadaan gizinya. Anak dengan konsumsi ASI yang cukup cenderung lebih sehat dan lebih kebal terhadap serangan penyakit dibanding anak yang tidak mendapat konsumsi ASI yang cukup. Penelitian mengungkapkan seorang anak sekolah yang ketika bayi mendapatkan ASI dapat mengikuti pelajaran lebih baik, nilai tes matematika standar dan membacanya lebih tinggi dibanding mereka yang tidak mendapatkan ASI.

## Analisis Statistik

Gambar 4. Persentase Balita umur 2-4 tahun yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui di Kota Sabang Tahun 2011



Sumber: Susenas 2011, BPS.

Menurut hasil Susenas 2012 pada gambar 4, menunjukkan masih ditemuinya balita yang disusui hanya sampai umur 6 bulan yaitu sebesar 2,75 persen. Sedangkan balita yang disusui selama 7-12 bulan sebesar 1,16 persen. Persentase bayi yang disusui selama 13-18 bulan semakin meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 25,46 persen. Balita yang disusui selama 19-24 bulan sebesar 61,87 persen.

Sisanya, yaitu 8,76 persen bayi di Kota Sabang disusui sampai usia lebih dari dua tahun (25 bulan ke atas). Hal ini berarti kesadaran pemberian ASI bagi balita di Kota Sabang tergolong cukup baik.

Sebenarnya makin lamanya waktu pemberian ASI menunjukkan makin baiknya kesadaran para orang tua akan pentingnya ASI bagi pertumbuhan sang buah hatinya. Pemberian ASI disamping baik bagi si bayi itu sendiri juga baik bagi kesehatan sang ibu.

Antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terdapat hubungan timbal balik. Pembangunan manusia memerlukan investasi di berbagai bidang, misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Investasi ini akan berdampak terhadap derajat kesehatan, keterampilan dan pengetahuan serta produktivitas penduduk. Kesemuanya itu pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

### **4.2 Tingkat Pendidikan**

Memang kendala utama upaya pembangunan pendidikan saat ini adalah kemiskinan dan

## Analisis Statistik

keterbelakangan/ketertinggalan. Bagi keluarga yang tidak mampu, biaya pendidikan anak tidak dapat dipenuhi. Oleh karenanya sebagian dari mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dan cenderung mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja membantu perekonomian rumah tangga.

Sebagian mereka beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin perbaikan taraf hidup. Khususnya tidak akan menjamin bisa memperoleh pekerjaan yang layak, apalagi untuk anak perempuan. Akibatnya timbul keengganan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama anak perempuan, sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada penghitungan IPM, tingkat pendidikan ditunjukkan oleh indikator rata-rata lamanya sekolah (MYS) dan tingkat melek huruf (Lit) menunjukkan tingkat pengetahuan suatu masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (penduduk) sebagai pengembangan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya. Apalagi adanya program pemerintah wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, mulai usia 7-15 tahun. Penerimaan dan pengembangan diri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan yang diterimanya.

*Tabel 4.2 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkatan Sekolah di Kota Sabang Tahun 2011*

<b>Tingkatan Sekolah</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Murid</b>	<b>Guru</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
SD sederajat	25	3 852	414
SLTP sederajat	9	1 431	260
SLTA sederajat	4	1 263	186
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>6 546</b>	<b>860</b>

*Sumber: Sabang Dalam Angka 2012*

Tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Jumlah sekolah di Kota Sabang untuk setiap tingkat baik swasta maupun negeri pada tahun 2012 yaitu 25 sekolah Sekolah Dasar (SD/sederajat), 9 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/sederajat), dan 4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/sederajat). Jumlah murid untuk setiap jenjang pendidikan adalah 3.852 murid SD, 1.431 murid SLTP, 1.263 murid SLTA, sedangkan jumlah guru ada, 414 guru SD, 260 Guru SLTP, 186 guru SLTA (tabel 4.2).

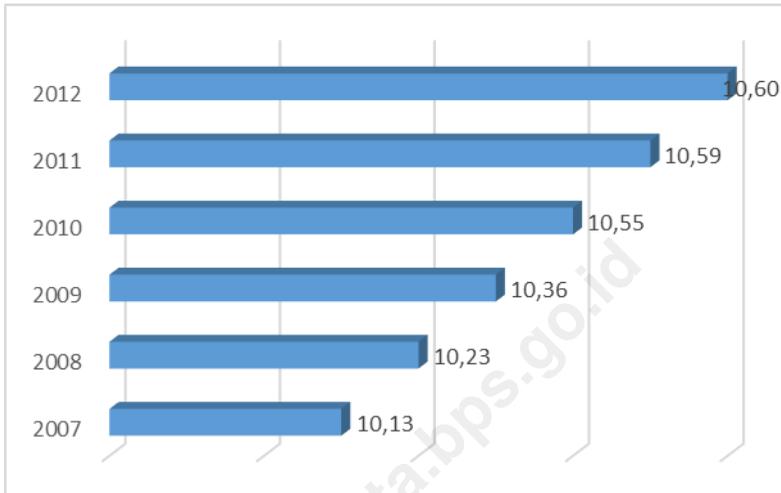
## Analisis Statistik

Pemerintah Kota Sabang terus menerus meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Sabang, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memperkecil rasio guru dan murid. Langkah ini belum memperlihatkan hasil yang memuaskan karena pada tahun 2012 rasio guru dan murid sebesar 1 : 10,7. Angka ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya (2011) Artinya bahwa seorang guru rata-rata hanya mengajari sepuluh hingga sebelas murid. Keadaan seperti ini sudah cukup efektif sehingga diharapkan kedepan pendidikan Sabang akan lebih baik lagi.

Pada tahun 2012 Indeks Pendidikan Kota Sabang sebesar 89,61 persen, angka ini menunjukkan tingkat pendidikan Kota Sabang yang relatif baik. Hal ini terlihat jelas dari skor rata-rata lamanya sekolah (*Mean Years School/MYS*) dan angka melek huruf (Lit).

MYS Kota Sabang pada tahun 2012 mencapai 10,60 tahun, artinya penduduk Kota Sabang rata-rata mencapai kelas 1 sampai kelas 2 SMA. Begitu juga Lit yang baik, pada tahun 2012 mencapai 99,09 persen, artinya hanya kurang dari satu persen penduduk Sabang yang buta huruf.

*Gambar 5. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kota Sabang Tahun 2007-2012*



*Sumber: BPS Kota Sabang*

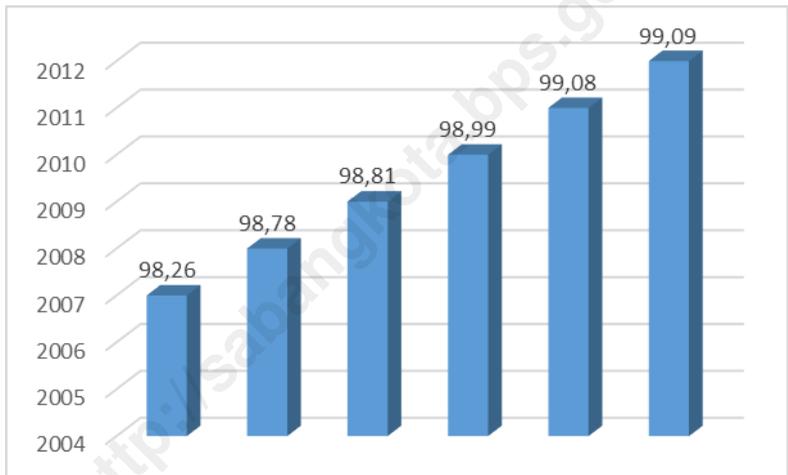
MYS dari tahun 2007-2012 terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada gambar 5. MYS sebesar 10,13 tahun pada tahun 2007, perlahan-lahan meningkat pada tahun 2008 menjadi sebesar 10,23 tahun, terus meningkat pada tahun 2009 mencapai 10,36 tahun dan tahun 2010 mencapai 10,55 tahun. Pada tahun 2011 naik sebesar 0,04 tahun menjadi 10,59 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa semua penduduk Kota Sabang secara rata-rata mampu mengenyam pendidikan formal selama 10-11 tahun atau setingkat SLTA tingkat 1 sampai tingkat 2.

## Analisis Statistik

Menurut standar UNDP untuk mendapatkan penduduk yang berkualitas, rata-rata lama sekolah yang harus ditekuni adalah selama 15 tahun (setingkat D III).

### ***Rata-rata Penduduk Kota Sabang Mampu Mengenyam Pendidikan Sampai Tingkat Satu/Dua SMU/Sederajat***

*Gambar 6. Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Sabang Tahun 2007-2012*



*Sumber: BPS Kota Sabang, 2012.*

Kondisi menggembirakan juga terjadi pada angka melek huruf yang mencapai 99,09 persen pada tahun 2011. Artinya 99,09 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota

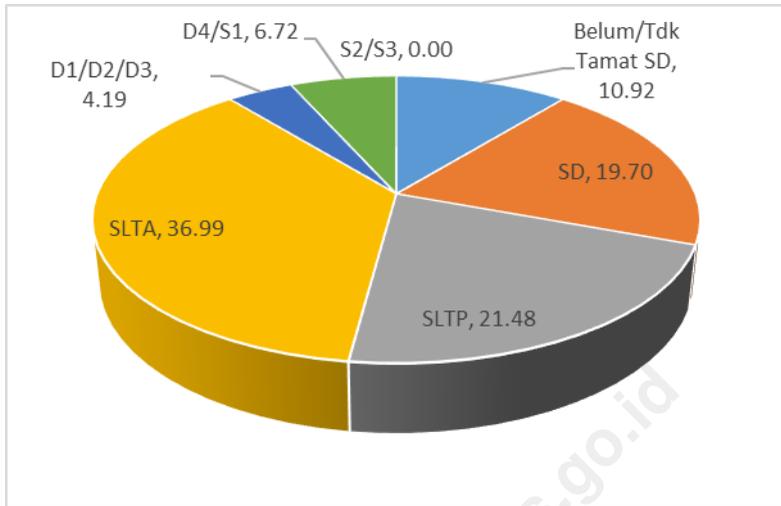
Sabang sudah bebas buta huruf. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,08 persen pada tahun 2011 dan 98,99 persen pada tahun 2010.

Berdasarkan hasil Susenas 2012 pada gambar 7, persentase penduduk 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di Kota Sabang menunjukkan persentase penduduk yang tidak punya ijazah SD sebesar 10,92 persen. Persentase penduduk Kota Sabang yang tamat SD mencapai 19,70 persen, pada tingkat SLTP penduduk yang sudah tamat mencapai 21,48 persen, tamatan SLTA mencapai 36,99 persen. Sisanya mencapai Diploma I/II/III (4,19 persen), tamatan Diploma IV/S1 mencapai 6,72 persen dan tamatan S2/S3 sebanyak 0 persen.

Dari angka-angka tersebut menunjukkan suatu prestasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sabang dalam menyelenggarakan pendidikan, akan tetapi perlu diwaspadai besarnya penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 1,92 persen, kondisi ini masih perlu dipacu untuk ditingkatkan partisipasi sekolah dari penduduk.

*Gambar 7. Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kota Sabang Tahun 2012*

## Analisis Statistik



Sumber: Susenas 2011, BPS.

Semakin tinggi tingkat keahlian seseorang, semakin tinggi pula ia menawarkan harga keahlian, sehingga akan memperbesar pendapatannya. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai atau rendah tingkat keahliannya, akan menerima berapapun upah/gaji yang diberikan karena tidak mempunyai “*bargaining power*” (kekuatan tawar-menawar) yang dapat diandalkan. Rendahnya pendapatan masyarakat pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan, seperti gizi dan sanitasi yang tidak memadai serta rendahnya penanganan suatu penyakit.

### 4.3 Kemampuan Daya Beli

Standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*) merupakan komponen ketiga selain dua komponen diatas yang juga digunakan sebagai unsur dasar penilaian pembangunan manusia. Kemampuan daya beli menjelaskan seberapa besar jumlah barang dan jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat dengan sejumlah uang yang dibelanjakan untuk konsumsi. Agar dapat dibandingkan baik antar waktu maupun antar wilayah maka kemampuan daya beli diukur dari sejumlah komoditi tertentu oleh masyarakat. Demikian juga nilai nominal pengeluaran konsumsi tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan harga standard yang telah ditetapkan. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk membeli barang dan jasa berbeda-beda tergantung dari pendapatan dan kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan daya beli seseorang berarti semakin banyak ragam barang dan jasa yang mampu dibeli.

Tingkat daya beli penduduk yang merupakan salah satu komponen yang diukur dalam pembangunan manusia. Komponen ini secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan besarnya pendapatan, produktifitas, dan kemampuan penduduk untuk menikmati hasil pembangunan. Menurut UNDP, untuk mengukur tingkat daya beli penduduk

## Analisis Statistik

dapat menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan (*Adjusted real GNP per capita*), namun karena keterbatasan data maka perhitungan indeks daya beli dilakukan dengan menggunakan konsumsi perkapita riil yang disesuaikan.

*Tabel 4.3 Pengeluaran Perkapita Riil Kota Sabang Tahun 2008-2012*

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran perkapita riil disesuaikan</b>
(1)	(2)
2008	Rp. 623 140,-
2009	Rp. 625 820,-
2010	Rp. 627 350,-
2011	Rp. 631 100,-
2012	Rp. 634 220,-

*Sumber : BPS Kota Sabang, 2012*

Pada tahun 2008, tingkat daya beli masyarakat Kota Sabang telah mencapai Rp. 623.140,- perkapita setahun, seterusnya meningkat dari tahun ke tahun yaitu Rp. 625.820,- pada tahun 2009, tahun 2010 mencapai Rp. 627.350,- tahun

2011 mencapai Rp. 631.100,- dan pada tahun 2012 terus meningkat menjadi Rp. 634.220,- dapat di lihat pada tabel 4.3.

Rata-rata pengeluaran perkapita riil disesuaikan masyarakat kota Sabang pada tahun 2012 berada diatas rata-rata pengeluaran perkapita riil Provinsi Aceh yang sebesar Rp. 618.790,- pada tahun 2012, hal ini wajar karena harga-harga kebutuhan di Kota Sabang relatif lebih mahal dibandingkan daerah lain di Provinsi Aceh.

Lebih lanjut, indeks daya beli penduduk Kota Sabang tahun 2012 mencapai 77,23 persen. Artinya kemampuan daya beli masyarakat Kota Sabang untuk mencapai daya beli maksimal hanya sebesar 77,23 persen.

#### **4.4 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan yang berorientasi manusia/ masyarakat sebagai obyek di Kota Sabang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan IPM Kota Sabang yang terus mengalami kenaikan setiap tahun. Sebagai gambarnya dapat dilihat pada gambar 8 berikut:

## Analisis Statistik

*Tabel 4.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sabang Tahun 2008- 2012*

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>
(1)	(2)
2008	75,00
2009	75,49
2010	75,98
2011	76,47
2012	76,88

*Sumber: BPS Kota Sabang, 2012*

Dilihat dari trendnya, selama lima tahun terakhir IPM Kota Sabang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang tahun 2012 sebesar 76,88, peringkat ketiga setelah Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Aceh secara rata-rata yang hanya mencapai 72,51 pada tahun 2012.

Angka IPM Kota Sabang hanya mengalami sedikit peningkatan dari 76,47 pada tahun 2011 menjadi 76,88 pada tahun 2012. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami mengingat dampak dari lambatnya peningkatan investasi di sektor kesehatan dan pendidikan, khususnya terhadap indikator penyusun IPM terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

IPM Kota Sabang berada pada skor IPM menengah menurut acuan UNDP, karena menurut lembaga ini skor IPM tergolong menengah bila terletak diantara 51 dan 79.

*IPM Kota Sabang Berada pada Peringkat 3 Se-Provinsi Aceh*

### **4.5 Reduksi *Shortfall***

Perbedaan laju pertumbuhan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi *shortfall* pertahun. Nilai reduksi *shortfall* IPM Kota Sabang tahun 2012 dari tahun sebelumnya (2011) sebesar 1,77 artinya bahwa IPM Kota Sabang mengalami peningkatan lebih cepat 1,77 kali dari tahun 2011. Angka ini berbeda jauh dibandingkan dengan

## Analisis Statistik

angka reduksi *shortfall* IPM provinsi Aceh yang hanya mencapai 1,27 pada tahun yang sama.

Jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain di seluruh Provinsi aceh, capaian angka reduksi *shortfall* Kota Sabang menduduki urutan ke 6. Ini artinya, laju pertumbuhan IPM Kota Sabang dari tahun 2011 ke tahun 2012 lebih lambat daripada Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat. Hal ini juga mengindikasikan proses pembangunan manusia di lima kabupaten/kota tersebut terbukti lebih cepat dibandingkan upaya pemerintah Kota Sabang dalam meningkatkan pembangunan manusia didaerahnya.

# Penutup





## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

#### **5.1 Kesimpulan**

IPM menunjukkan seberapa jauh keberhasilan (*performance*) suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas sosial. Oleh karena itu, IPM dapat dijadikan dasar untuk penentuan target dan pengukuran kemajuan program-program pembangunan di bidang sosial. Kinerja pembangunan sosial Kota Sabang terutama dalam hal peningkatan kualitas lingkungan, gizi dan pendidikan ibu dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan peningkatan pembangunan pendidikan perlu mendapat penekanan yang lebih serius.

Indikator IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat diharapkan tercermin dalam angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan untuk

## Penutup

dampak non-fisiknya (intelektualitas) bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat.

Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesetaraan jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator-indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), IKM (Indeks Kemiskinan Manusia) dan IMH (Indeks Mutu Hidup) sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Sabang tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai **76,88**. Hal ini disebabkan karena seluruh komponen IPM mengalami peningkatan baik angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan kemampuan daya beli. IPM kota Sabang termasuk baik dengan peringkat ke tiga dari seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Aceh setelah Kota Banda

Aceh dan Kota Lhokseumawe. Hal ini merupakan suatu kebanggaan, namun IPM kota Sabang masih digolongkan menengah. Kondisi seperti ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

### 5.2 Saran

Gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kota Sabang, diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan setiap komponen IPM yang telah dicapai.

Di bidang kesehatan misalnya, Pemerintah Kota Sabang mesti lebih intensif dalam hal perbaikan angka harapan hidup. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh adanya faktor pelayanan kesehatan, lingkungan dan perilaku. Intervensi pelayanan diarahkan dalam rangka memperbaiki faktor lingkungan dan perilaku masyarakat.

Di bidang pendidikan, penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan *drop out* murid sekolah harus tetap mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan upaya lain, seperti: pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah, sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara

## Penutup

berkelanjutan. Dengan masih rendahnya pendidikan di masyarakat pedesaan, perlu langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak hingga pendidikan tertinggi.

Taraf standar hidup masyarakat Kota Sabang dapat ditingkatkan dengan mendorong laju investasi baik pemerintah maupun swasta kepada pembangunan yang mengarah ke daerah-daerah yang kurang berkembang, misalnya ke daerah-daerah pedesaan. Dan dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, upaya pengembangan usaha skala mikro tampaknya dapat menjadi alternatif pilihan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal.

Oleh karena itu kebijakan maupun intervensi yang kelak akan dilaksanakan hendaknya memprioritaskan pembangunan ekonomi tanpa harus mengesampingkan pembangunan kualitas manusia dan meninggalkan aspek pemerataan dimana pembagian penguasaan sumber daya ekonomi lebih meluas dan merata serta mengenai bagian

## Penutup

terbesar rakyat agar kemakmuran dapat dirasakan oleh rakyat banyak, terutama pada wilayah-wilayah yang relatif tertinggal maupun wilayah yang dapat dikategorikan sudah “berhasil” dalam pembangunan manusianya.

<http://sabangkota.bps.go.id>







Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sabang  
Jl. Yos Sudarso No.45 Sabang Tep. (0652) 22922 Fax. (0652) 21184  
website: [bappeda.sabangkota.go.id](http://bappeda.sabangkota.go.id) Email: [bappeda\\_sabang@yahoo.com](mailto:bappeda_sabang@yahoo.com)

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Sabang  
Jl. T. Umar No.28 Sabang 23511 Telp/Fax. (0652) 21346  
Website: [sabangkota.bps.go.id](http://sabangkota.bps.go.id) Email: [bps1172@bps.go.id](mailto:bps1172@bps.go.id)